



Buletin Parlementaria

Legislator Dorong Pemerintah Berikan Dukungan Terhadap Inovasi Pupuk Organik



**3 Penegak Hukum
Harus Usut
Tuntas Kasus
Perdagangan
Ginjal WNI**



**16 Korban
TPKS Tidak
Tertanggung
BPJS, Nurhayati
Soroti Perpres 82
Tahun 2018**

Nomor 1257/V/VII/2023 • Juli 2023



9 772614 339005



Legislator Dorong Pemerintah Beri Dukungan Terhadap Inovasi Pupuk Organik

Para petani di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berhasil meracik pupuk organik yang diberi nama Biosaka. Pupuk ini terbukti tanaman kedelai tumbuh subur dan menghasilkan polong kedelai yang besar dan banyak. Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja reses ke Demak meninjau kesuksesan pupuk tersebut dan merekomendasikan agar pemerintah memberikan dukungan bagi upaya para petani di daerah ini.

"Bagi Kabupaten Demak, ini baru pertama kali menanam kedelai. Biasanya mereka menanam kacang hijau. Menurut saya bagus. Kalau dilihat dari umur yang satu setengah bulan, polongnya sudah banyak dan besar-besar. Estimasi dan proyeksinya bagus," ujar Anggia saat kunjungan kepada **Parlementaria**, Senin (17/7). Menurutnya, Biosaka sendiri sebetulnya bukan pupuk atau pestisida, tapi elisitor yang mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida hingga 50 sampai 90 persen. Biosaka juga terbukti meminimalisir serangan hama dan menjadikan lahan lebih subur.

Anggia melihat, pertumbuhan akar tanaman kedelai yang menggunakan Biosaka, ternyata serabut akarnya lebih banyak daripada yang tidak mengaplikasikan Biosaka. Sehingga, serabut akar itu mengalirkan nutrisi lebih banyak ke batang tanaman. Biosaka saat ini diketahui masih diproduksi secara terbatas dan mandiri oleh para petani. Kelak produk ini akan diserahkan ke kementerian terkait untuk diteliti dan

ditindaklanjuti produksinya.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyerukan, semua pihak agar memberi dukungan terhadap inovasi pertanian organik berupa Biosaka yang terbukti menyuburkan tanaman. "Kita lihat kedelai yang menggunakan Biosaka ternyata hasilnya lebih maksimal. Yang menggunakan Biosaka, batang dan buahnya lebih banyak," ungkap Firman di tempat yang sama.

Menurutnya, Biosaka sangat mudah dan murah diproduksi. Biosaka dibuat dari bahan-bahan organik, seperti daun dan rerumputan yang dicampur air, kemudian diperas. Cairan hasil perasan inilah yang bisa diaplikasikan untuk tanaman perkebunan. "Ke depan, kami ingin bicara dengan pemerintah agar ada

regulasi dan *supporting system* untuk mendukung masyarakat dalam memanfaatkan Biosaka," harap Anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

Politisi Partai Golkar ini turut menambahkan, Biosaka seperti suplemen herbal bagi manusia. Ketika minum herbal, misalnya, diminum manusia, imun tubuh meningkat dan akhirnya jadi produktif. Bila teknologi pertanian organik ini terus dikembangkan, bisa menyejahterakan para petani, terutama di wilayah Pantura Jawa. "Kita melihat perbedaan signifikan yang menggunakan Biosaka dan tidak. Yang menggunakan biosaka, lebar daunnya hampir setelapak tangan. Yang tidak menggunakan Biosaka, kecil," tutupnya.

— mh/aha



Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo (kiri) saat mengunjungi ladang kedelai dan kacang hijau dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Scan QR untuk berita selengkapnya



RUU KIA Diharapkan Dapat Dukungan dari Segenap Pihak

Isu kesehatan mental anak selama ini belum menjadi perhatian khalayak. Padahal, isu ini sangat penting dalam tumbuh kembang anak sebagai tunas penerus bangsa. Ketua DPR RI Puan Maharani menyadari, negara masih memiliki banyak tantangan dalam menciptakan generasi masa depan yang berkualitas.

Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang merupakan RUU Inisiatif DPR sangat diperlukan untuk mendukung perbaikan kualitas anak Indonesia, khususnya dari kalangan kurang mampu.

"Untuk menciptakan generasi unggul, orang tua harus dibantu Pemerintah dalam mengupayakan tumbuh kembang maksimal pada

”

**UNTUK
MENCIPTAKAN
GENERASI UNGGUL,
ORANG TUA
HARUS DIBANTU
PEMERINTAH
DALAM
MENGUPAYAKAN
TUMBUH KEMBANG
MAKSIMAL PADA
ANAK.**

anak. Salah satunya memberikan gizi seimbang bagi anak mulai dari kandungan hingga 1.000 hari pertama setelah melahirkan," papar Puan di Jakarta, Senin (24/7).

"Untuk menciptakan generasi berkualitas, pastinya dukungan untuk ibu juga sangat diperlukan. Oleh karenanya, DPR menginisiasi RUU KIA karena DPR memahami perkembangan anak tidak terlepas dari peran ibu," imbuhnya.

Ia pun berharap RUU KIA dapat segera terealisasi menjadi UU dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan industri. Salah satunya dengan memberikan kesempatan bagi ibu bekerja untuk memiliki ruang menjalankan perannya dalam memberikan pengasuhan terbaik bagi anak sambil menjalankan tanggung jawabnya sebagai pekerja. **ts/rdn**



Ketua DPR RI
Dr. (H.C.) Puan Maharani.

FOTO: ENO/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



**LEGISLATOR DORONG PEMERINTAH
BERI DUKUNGAN TERHADAP
INOVASI PUPUK ORGANIK**

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K. PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh
Pawestri, S.I.Kom, Nadhien Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom,
Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske
Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli,
Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum
Alaydrus, Bunga Leonnaricha Fista Dysie, Balegys Maeshyntha, Anju
Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldidi Opie,
Hasni Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P,
Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,
Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita,
Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Ria Damayanti

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Gus Imin: Pembangunan Desa Solusi Ketimpangan Ekonomi



FOTO: KSB/PDI

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Gus Imin

menyatakan, mengatasi ketimpangan ekonomi tidak bisa dilakukan secara parsial dan tambal sulam. Menurut Gus Imin, perlu komitmen kuat dalam suatu formula dan juga inovasi. Tak hanya itu, diperlukan juga terobosan baru mulai dari perubahan paradigma kebijakan pembangunan, ditopang kelembagaan yang mapan, infrastruktur dan insentif yang mendukung serta pengawasan yang ketat dalam implementasi di lapangan.

"Satu hal yang kita tidak bisa pungkiri bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi paradoks yang menyertai dalam proses


pembangunan bangsa ini. Mengatasinya tidak bisa parsial, tapi perlu inovasi dan terobosan baru," ujar Gus Imin dalam rilis yang diterima **Parlementaria**, Selasa (18/7). Gus Imin menyampaikan hal ini dalam rangka menanggapi data Profil Kemiskinan di Indonesia edisi Maret 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (17/7).

Gus Imin mengungkapkan, sebagaimana catatan BPS, tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun menjadi 9,36 persen dari total populasi Indonesia atau 25,9 juta orang. Namun, jurang antara yang kaya dan miskin justru semakin lebar. BPS mencatat, per Maret 2023, rasio gini naik ke level 0,388 dari sebelumnya 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Ketimpangan yang menajam

itu terjadi di wilayah perkotaan, sementara di pedesaan tetap stagnan.

Terkait hal itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan perlu adanya perubahan pola pembangunan. Di antaranya, tandas Gus Imin, yaitu perubahan pola dari atas ke bawah saat ini, harus dibalik menjadi dari bawah ke atas atau dari Desa.

"Kalau pembangunan kita balik dari bawah atau dari Desa, saya yakin ketimpangan ekonomi bisa kita atasi. Jurang antara orang kaya dan miskin di negeri ini bisa dipangkas. Karena Desa itu kunci pembangunan, kunci kemajuan. Desa itu solusi ketimpangan," pungkas Pimpinan Bidang DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.

 pun/rdn



Jelang Pemilu 2024, Komisi I Dorong RRI Manado Tetap Jaga Netralitas Siaran

Tim Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Tim Kunker Reses Bambang Kristiono menekankan pentingnya netralitas siaran serta peran penting RRI dalam memberikan edukasi dan informasi yang relevan kepada masyarakat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Netralitas RRI harus terjaga, kemudian juga ada partisipasi aktif dan dorongan langsung dari RRI Manado ini untuk memberikan imbauan dan ajakan kepada masyarakat setempat untuk melek politik dan memberikan pilihan sesuai dengan pilihan politiknya masing-masing," ujar Bambang kepada **Parlementaria** usai memimpin pertemuan Komisi I di LPP RRI Manado, Sulawesi Utara, Selasa (18/7).

Dalam konteks pemilu, RRI memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang mengenai calon, partai politik, dan isu-isu terkait pemilu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif dan kesadaran politik masyarakat dalam proses demokrasi.

Legislator Partai Gerindra tersebut menekankan peran penting RRI dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut meramaikan pesta demokrasi 2024 mendatang. Dalam konteks pemilu, RRI memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan



FOTO: BLF/PDI

Ketua Tim Kunker Reses Bambang Kristiono saat memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI di LPP RRI Manado, Sulawesi Utara, Selasa (18/7/2023).

berimbang mengenai calon, partai politik, dan isu-isu terkait pemilu.

"RRI memiliki peran strategis dalam memberikan efek positif kepada masyarakat. Melalui program-programnya, RRI dapat memberikan edukasi politik yang berkualitas dan memberikan informasi yang objektif kepada seluruh masyarakat," ungkapnya

Dalam kunjungan kerja reses ini, Bambang Kristiono juga berkesempatan untuk mendengarkan aspirasi dari RRI yang bertugas di perbatasan

Sulawesi Utara dan menggali berbagai isu yang perlu diperhatikan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan dan netral

Komisi I DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong RRI untuk terus menjadi satu-satunya lembaga penyiaran yang independen. Hal ini diharapkan dapat memperkuat proses demokrasi di Indonesia dan melibatkan masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan politik. **blf/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapannya



Komisi II: Persiapan Pemilu di Sumut Sudah ‘On The Track’

Penyelenggaraan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Karena itu, untuk memastikan kesiapan menghadapi Pemilu 2024, Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Medan, Sumatera Utara. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi kesiapan Provinsi Sumatera Utara dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Doli saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Utara, Senin (24/7).

"Persiapan penyelenggara pemilu di Sumatera Utara ini *on the track* dan sesuai dengan perencanaan yang selama ini sudah ditetapkan, tinggal sisa 6 bulan ini saya kira memang harus lebih diintensifkan terutama koordinasi antara Bawaslu dan KPU," ujarnya kepada **Parlementaria**.

”

PERSIAPAN PENYELENGGARA PEMILU DI SUMATERA UTARA INI ON THE TRACK DAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN YANG SELAMA INI SUDAH DITETAPKAN, TINGGAL SISA 6 BULAN INI SAYA KIRA MEMANG HARUS LEBIH DIINTENSIFKAN TERUTAMA KOORDINASI ANTARA BAWASLU DAN KPU.

Legislator Fraksi Golkar ini juga menambahkan tentang pentingnya jaminan asuransi untuk para penyelenggara Ad Hoc petugas Pemilu hingga tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara). Hal itu khususnya dalam menjalankan tugasnya agar mendapatkan rasa aman dalam menghadapi pemilu.

"Kami terus memperjuangkan agar lancar para penyelenggara Ad Hoc baik itu di lingkungan keluarga besar KPU maupun Bawaslu dari tingkat kelurahan, desa sampai nanti ke TPS kalau bisa mendapatkan asuransi, memang sudah ada Instruksi Presiden yaitu menjadi dasar hukum dan kemudian ditambah lagi dengan surat Kemendagri kepada Gubernur Bupati dan Walikota, ternyata sudah dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota," jelasnya.

Seperti diketahui pada bulan Juni 2023, kabar duka datang dari Kabupaten Batubara,

Provinsi Sumatera Utara, yang ditemukan bahwa seorang Panitia Pemungutan Suara (PPS), mengalami kecelakaan lalu-lintas saat menjalankan tugas dan meninggal dunia. Saat kecelakaan, korban sedang dalam perjalanan untuk mengikuti rapat di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

— pdt/rdn



FOTO:PRIMA

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Utara, Senin (24/7/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Usut Tuntas Kasus Tewasnya Tahanan di Polresta Banyumas

Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafarez meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tewasnya seorang tahanan di Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Selain itu, Polri diingatkan untuk menindak tegas oknum Polisi yang terlibat dalam kasus ini demi keadilan bagi korban.

"Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dibatasi oleh status tahanan, sehingga sekalipun seseorang sedang ditahan polisi, yang bersangkutan tetap berhak dilindungi keamanannya, sesuai dengan aturan perundang-undangan," kata Gilang dalam rilis yang diterima **Parlementaria**, Kamis (20/7).

Seperti diketahui, tersangka kasus dugaan pencurian sepeda motor (curanmor) berinisial OK (26) tewas dengan kondisi penuh luka saat berada di dalam tahanan Polresta Banyumas. Diduga, OK mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh sesama tahanan.

Polisi telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tewasnya OK. Hasil sementara, 11 oknum polisi terlibat di mana empat orang pelanggarannya masuk dalam ranah pidana berkaitan dengan proses penangkapan korban. Empat oknum Polri yang melakukan pelanggaran disiplin itu saat ini sudah dilakukan penahanan. Sementara tujuh polisi lainnya dikenakan sanksi kode etik lantaran dianggap lalai ketika mengawasi tahanan sehingga terjadi pengeroyokan terhadap korban.

”
HAK ASASI MANUSIA (HAM) TIDAK DIBATASI OLEH STATUS TAHANAN, SEHINGGA SEKALIPUN SESEORANG SEDANG DITAHAN POLISI, YANG BERSANGKUTAN TETAP BERHAK DILINDUNGI KEAMANANNYA, SESUAI DENGAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Gilang pun meminta agar pengusutan yang dilakukan Polri terkait kasus ini dilakukan dengan mengedepankan transparansi publik. "Buka pengusutan kasus tewasnya tahanan di Polresta Banyumas selebar-lebarnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi sehingga keluarga korban dan publik betul-betul mengetahui semua informasi terkait kematian korban," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

"Tindakan tegas kepada oknum-oknum yang terlibat juga harus dilakukan, karena masalah kekerasan di dalam tahanan sudah menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan," tandas Gilang.

— **ssb/rdn**



FOTO: RDN/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafarez.

Scan QR untuk berita selengkapnya



I Made Urip: Jaga Alam, Bali Perlu Perluas Area Tutupan Hutan

Setiap wilayah perlu memperluas area tutupan hutannya lebih dari 30 persen untuk menurunkan potensi kerusakan lingkungan dan bencana hidrometeorologi. Tutupan hutan yang masih ada harus dijaga agar tidak dikonversi. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip usai melakukan pertemuan Tim Komisi VI dengan pemerintah provinsi Bali dan jajarannya, dalam rangka Kunjungan Kerja Reses di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Denpasar, Senin (17/7).

”
PEMERINTAH PERLU TERUS MENSOSIALISASIKAN PEMAHAMANNYA TENTANG PERLUNYA MENJAGA LINGKUNGAN DAN EKOSISTEM HUTAN. KEMUDIAN BERIKAN BIBIT UNTUK MEREKA (MASYARAKAT) TANAM.

Dijelaskan Made, tutupan hutan di Bali saat ini baru mencapai 24 persen. Hal itu menurutnya merupakan tantangan yang perlu segera dicarikan solusi. Salah satu upaya memperluas area tutupan hutannya lebih dari 30 persen untuk menurunkan potensi kerusakan lingkungan dan bencana, lanjut Made, dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta menanam pohon dan melakukan restorasi ekosistem.

Masyarakat di Bali, lanjut Legislator Fraksi PDI perjuangan itu, sebenarnya sangat mengimplementasikan ajaran Tri Hita Karana dalam kehidupan. “Pemerintah perlu terus mensosialisasikan pemahamannya tentang perlunya menjaga lingkungan dan ekosistem hutan. Kemudian berikan bibit untuk mereka (masyarakat) tanam,” katanya.

Selain itu, Legislator Fraksi PDI perjuangan itu juga memandang bahwa sinergi dan koordinasi lintas sektor terus ditingkatkan agar upaya tata kelola hutan yang berkelanjutan dapat terwujud. “Sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dijaga,” tegasnya.

Aturan untuk menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30 persen dari luas DAS sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, ketentuan ini dihapus dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Cipta Kerja.

ria/rdn



FOTO: RIA/PDI

Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip saat mengikuti pertemuan Tim Komisi VI dengan pemerintah provinsi Bali dan jajarannya di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Denpasar, Senin (17/7/2023).



Batas Wilayah Luar Indonesia Harus Berdaulat

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Pengelolaan Wilayah Batas Luar DPR RI RI Yohanis Fransiskus Lema menilai Inpres pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan memberi penegasan pada negara untuk hadir sampai di wilayah pelosok perbatasan. Sehingga menurutnya, wilayah batas terluar ini harus berdaulat.

"Kita harus bisa pastikan bahwa yang namanya beranda depan ini tidak boleh kumuh, jorok dan kotor dan tidak boleh miskin maka ketika kita bicara soal kedaulatan atau sovereignty," ungkap Yohanis dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah dengan agenda Evaluasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023-2024 di Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Lebih lanjut ia menilai bahwa Indonesia tidak bisa semata mata berpatokan pada keamanan

konvensional meski ada Polri dan TNI. Sebab jika bicara soal *prosperity*, ancaman dapat dilihat dalam bentuk selain fisik, salah satunya yakni kemiskinan. "Maka Inpres ini memberi judul percepatan pembangunan ekonomi," terangnya.

Ia pun menilai, bahwa penjelasan pemerintah selama ini berdasarkan pemaparan sebelumnya terkesan sangat *state centric* karena belum terlihatnya keberpihakan dan pendekatan yang lebih ke arah *society centric* yang berfokus pada pemberdayaan serta pelibatan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi.

"Saya kasih contoh soal NTT misalnya NTT itu Angka kemiskinan di atas 20% dan masyarakat di wilayah perbatasan itu rata-rata miskin semua. profesi mereka yang utama adalah petani peternak dan nelayan. kalau kita mau memberi harkat dan martabat kepada

wilayah perbatasan kita mestinya intervensi kebijakan itu pada sektor-sektor yang terkait dengan hajat hidup mayoritas masyarakat di perbatasan," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Maka dari itu, dirinya menyetujui apabila pendekatan dalam pengelolaan masyarakat di batas luar Indonesia bersifat *bottom up*. Terlebih, menurutnya memang setiap perbatasan punya persoalannya masing-masing sehingga pendekatannya juga kontekstual. "Betul pembangunan manusia pasti dasarnya kesehatan Pak Menteri Kesehatan. pendidikan *yes* tetapi ekonomi mereka ini harus juga bisa kita gerakkan," pungkas politisi asal NTT ini. — **hal/aha**

”

KITA HARUS BISA PASTIKAN BAHWA YANG NAMANYA BERANDA DEPAN INI TIDAK BOLEH KUMUH, JOROK DAN KOTOR DAN TIDAK BOLEH MISKIN MAKA KETIKA KITA BICARA SOAL KEDAULATAN ATAU SOVEREIGNITY.

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: MRI/PDT

Anggota Tim Pengawas Pengelolaan Wilayah Batas Luar DPR RI RI Yohanis Fransiskus Lema saat mengikuti Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah di Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Sinergitas Pemerintah dalam Percepatan Rekonstruksi Gempa di Palu Cukup Baik

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai, koordinasi dan sinergitas antar mitra kerja di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya percepatan rekonstruksi pasca bencana gempa likuifaksi sudah cukup baik. Hal itu terbukti dengan adanya penentuan wilayah zona hijau yang sudah bisa ditempatkan kembali oleh masyarakat sebagai permukiman terdampak bencana hebat yang terjadi pada 2018 lalu.

Hal itu disampaikan Andi Iwan kepada **Parlementaria** usai melakukan seluruh rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke lokasi pasca bencana Likuifaksi. Kunjungan tersebut dilanjutkan ke lokasi pembangunan Hunian Tetap yang berada di Petobo, dan peninjauan pembangunan DAM/Bendungan di Desa Bangga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

"Overall saya kira koordinasi mereka cukup baik, bahwa dalam penentuan wilayah yang tidak menjadi wilayah merah itu sudah ditentukan kerja sama koordinasi dengan BMKG, koordinasi lembaga lainnya, kemudian PUPR menetapkan lokasi kemudian juga membangun. Saya kira koordinasi dengan mitra kerja Komisi V DPR RI khususnya dengan BMKG, Basarnas, Kementerian PUPR, beserta Kementerian Perhubungan dalam hal ini secara khusus mungkin terkait masalah bandara, ini kan semua



FOTO: NDIY/PDT

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat meninjau sejumlah lokasi Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Sulawesi Tengah.

sudah menjadi ketetapan atas bencana itu semua terkoordinasi dengan baik," tuturnya, di Sulawesi Tengah, Jumat (14/7).

Ia pun menilai kinerja Basarnas pun sudah optimal. Oleh karena itu, ia menegaskan Komisi V akan mendukung kinerja tiap mitra agar lebih maksimal lagi sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Tentunya kita akan selalu mengacu pada proses penganggaran. Kami dari Komisi

V akan berusaha semaksimal mungkin memberikan dukungan anggaran itu. Karena kita tahu tidak hanya Sulawesi Tengah, tapi hampir berapa banyak wilayah di Indonesia yang juga membutuhkan hal yang sama, dan inilah semuanya akan kita inventarisir, dan kemudian memberikan prioritas anggaran yang kira-kira di wilayah mana yang harus didahului, yang bisa ditangani dengan anggaran tersebut," pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. **ndy/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pemerintah Harus Beri Perhatian pada Infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata

Provinsi Riau bukan hanya kaya akan minyak bumi, gas dan jutaan hektar perkebunan kelapa sawit. Bumi Lancang Kuning juga memiliki kekayaan budaya dan tradisi, sebagaimana *tagline*-nya "Riau The Homeland of Melayu". Destinasi-destinasi wisata baru terus bermunculan, yang beberapa di antaranya meraih penghargaan di tingkat nasional.

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mendorong agar Pemerintah Pusat memberi perhatian pada infrastruktur kawasan strategis pariwisata. Hal ini diungkapkannya saat melakukan tinjauan langsung ke Ombak Bono

dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi V, dalam tinjauan ini juga didampingi oleh Gubernur Provinsi Riau Syamsuar beserta jajarannya, dan Perwakilan dari Kementerian PUPR.

"Maka dari itu sudah seharusnya pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur yang mendukung kawasan strategis pariwisata nasional tersebut. Karena Provinsi Riau termasuk salah satu daerah penyumbang devisa negara yang cukup besar di Indonesia," papar Mulyadi di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (14/7).

Ombak Bono adalah fenomena

alam yang diakibatkan pertemuan arus pasang air laut dengan arus sungai dari hulu menuju muara (hilir). Sebuah objek wisata dengan lokasi sungai, wisata lokal namun cita rasa internasional yang berlokasi di Muara (Kuala) sungai Kampar Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

"Selain potensi pariwisata yang berada disini yaitu wisata ombak bono yang sudah menjadi objek wisata nasional, di sekitar lokasi juga terdapat potensi pertanian. Dengan potensi tersebut, jika tidak didukung oleh infrastruktur yang baik dari pemerintah pusat, maka anggaran yang dimiliki daerah tidak akan cukup," jelas Mulyadi. **— sb/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi saat meninjau langsung ke Ombak Bono dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi V di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (14/7/2023).

Hadapi Kelangkaan Pupuk, Komisi VI Soroti Revitalisasi PT Pupuk Kujang Cikampek



FOTO:TS/PDT

Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Haekal foto bersama usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke PT Pupuk Kujang Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (17/7/2023).

Komisi VI DPR mengingatkan PT Pupuk Kujang Cikampek agar menyusun rencana yang matang untuk revitalisasi pabrik. Pasalnya, upaya tersebut bernilai krusial guna meningkatkan pasokan pupuk komersial, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu, rencana revitalisasi pabrik juga harus mempertimbangkan keterlibatan berbagai sektor sekaligus dampak yang akan terjadi demi menekan kasus kelangkaan pupuk.

"Urusan revitalisasi tentu pasti agenda prioritas. Nah, itu harus juga dibicarakan dengan PT Pupuk (Indonesia) (sebagai BUMN) holding. Mungkin, kita bicarakan saat rapat dengan pupuk holding," ucap Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Haekal kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Reses

”

URUSAN REVITALISASI TENTU PASTI AGENDA PRIORITAS. NAH, ITU HARUS JUGA DIBICARAKAN DENGAN PT PUPUK (INDONESIA).

Komisi VI DPR ke PT Pupuk Kujang Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (17/7).

Menjalankan fungsi pengawasan, Politisi Fraksi Gerindra itu turut menekankan jika revitalisasi pabrik berjalan dan produksi pupuk komersial meningkat, maka harus dipastikan penentuan harga pupuk komersial dengan harga pupuk subsidi tidak boleh memiliki kesenjangan yang tinggi. "Jangan

sampai harga yang tinggi membuat masyarakat sulit membeli pupuk," tegasnya.

Kemudian, terkait dengan distribusi pupuk komersial, dirinya menilai perlu membicarakan skema konsinyasi secara lebih lanjut. Hal ini jadi perhatian agar setiap lini distribusi yang terlibat tidak dibebani oleh biaya yang berat. Di mana, jika dipertimbangkan, para agen tidak terbebani dengan harus membeli produk pupuk komersial untuk disalurkan lalu dijual kepada masyarakat.

"Distributor jadi mau menyediakan karena mereka tidak dibebani dengan cost yang terlalu berat. (Jika) terjadi kelangkaan atau karena kekurangan tersedianya pupuk subsidi, masyarakat masih mau beli (pupuk komersial)," pungkas Haekal.

[ts,iru/rdn](https://ts.iru/rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Harris Turino Soroti Rencana Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino menyoroti rencana Pemerintah Pusat dan Badan Pengusahaan (BP) Kota Batam yang akan melakukan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar. Diketahui, pengembangan pelabuhan tersebut sebagai terminal peti kemas berpotensi memiliki kapasitas sebesar 10 ribu TEUs (*Twenty-Foot Equivalent Units*). Meskipun demikian, ia mempertanyakan aspek kedalaman pelabuhan yang perlu diperiksa ulang dalam rangka membangun proyek tersebut.

"Tadi sudah dipaparkan oleh Kepala BP Batam tentang rencana pengembangan Batam ke depannya ada beberapa hal yang saya soroti yaitu yang pertama mengenai pengembangan Pelabuhan Batu Ampar sebagai terminal peti kemas rencananya kapasitas 10 ribu TEUs," ujar Harris Turino kepada **Parlementaria** saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI, di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (15/7).

Menurutnya, rencana pembangunan pelabuhan kota ini penting untuk memastikan agar kapasitas minimal 10 ribu TEUs dapat tercapai. Sehingga, hal itu menuntut adanya kedalaman pelabuhan yang mencapai 16-18 meter. Meskipun demikian, menurutnya, studi terbaru menunjukkan bahwa kedalaman maksimal yang dapat dicapai oleh pelabuhan tersebut hanya 12 meter. Karena itu, ia meminta perlu adanya pengecekan ulang untuk mencapai

target yang diinginkan.

"Ya ini harus dipastikan bahwa minimum 10 ribu tercapai untuk ini, maka kedalaman 16-18 meter harus mencapai, sehingga ada beberapa studi yang mengatakan bahwa maksimal kedalaman 12 meter," ungkapnya.

Selain itu, menurutnya, perlu dipertimbangkan apakah penggalian yang lebih dalam dari 12 meter merupakan solusi yang layak dan efisien. Sehingga, hal itu berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan untuk penggalian tersebut. Biaya penggalian ini juga sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti luas area yang perlu digali, jenis tanah atau pasir yang harus diangkat, teknologi yang digunakan, dan dampak lingkungan yang mungkin terjadi.

"ini harus dicek ulang Apakah benar karena pendedukan

(penggalian) lebih dalam dari 12 meter biayanya berapa ya, biaya ini sangat menjadi faktor penting yang harus diangkat menjadi teknologi dan akan berdampak pada lingkungan," pungkask Politisi Fraksi PDIP ini.

Diketahui, tujuan dari pengembangan Pelabuhan Batu Ampar ini adalah untuk menyaingi kawasan sekitar, terutama dalam hal daya saing dengan Tanjung Pelepas di Malaysia dan pelabuhan di Singapura. Kedalaman yang memadai akan memungkinkan Batam menjadi pilihan yang menarik bagi kapal-kapal kargo kontainer yang ingin memasuki Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi destinasi utama bagi kapal-kapal tersebut melalui pelabuhan di Batam. Sehingga, hal ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas ekonomi dan perdagangan di wilayah tersebut.

— gys/rdn



FOTO: GYS/PDI

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino (kanan) saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI, di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (15/07/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi VII Dukung Penuh Pembangunan dan Pengembangan PLTA di Sumut



FOTO:AYU/PDT

Ketua Komisi VII DPR RI, Donny Oekon saat memimpin kunjungan kerja Reses Komisi VII DPR ke Sumatera Utara, Jumat (14/7/2023).

Komisi VII DPR RI mendukung penuh pengembangan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Sumatera Utara, seperti PLTA Sigura-gura, PLTA Tangga dan PLTA Asahan. Keberadaan banyak PLTA itu akan mendukung pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga maupun kebutuhan industri.

"Kita melihat sendiri bahwa dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, kita bisa kok menjalankan *green energy* untuk mencukupi kebutuhan listrik kita. Salah satunya dengan mengembangkan PLTA (pembangkit

listrik tenaga air). Seperti PLTA tempat kami berada saat ini, yakni PLTA Sigura-gura," ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Donny Oekon dalam kunjungan kerja Reses Komisi VII DPR ke Sumatera Utara, Jumat (14/7).

Dijelaskan politisi dari Fraksi PDI Perjuangan inl, PLTA tersebut selain dapat mencukupi kebutuhan listrik masyarakat, PLTA juga bisa memenuhi kebutuhan listrik industri. Salah satunya PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM Persero), yang notabene merupakan BUMN yang memproduksi aluminium.

Pabrik Inalum berada di Kuala Tanjung, Provinsi Sumatera Utara ini menghasilkan produk mulai dari

aluminium ingot, billet, sampai alloy. Untuk menghasilkan produk tersebut, sejak Tahun 1982, INALUM mengutamakan sumber energi bersih dengan mengandalkan energi terbarukan dari 2 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yakni PLTA Siguragura dan PLTA Tangga yang terletak di Paritohan. PLTA tersebutlah yang memasok listrik ke pabrik peleburan aluminium PT INALUM.

"Dengan penggunaan PLTA yang notabene merupakan energi bersih, ini sejalan dengan Target *Net zero emission* tahun 2060 yang dicitakan Pemerintah. Sementara itu bagi Inalum sendiri, PLTA bisa menambah pemenuhan kebutuhan listrik dalam proses produksinya. Oleh karenanya itu tentu kami akan terus mendukung pengembangan PLTA Asahan dan PLTA lainnya," pungkas Donny.

Lebih lanjut Dony berharap dengan terus mengembangkan PLTA yang ada, maka produksi aluminium dari BUMN yang tergabung dalam Mind.Id tersebut juga dapat meningkatkan. Hingga bisa memenuhi kebutuhan aluminium dalam negeri, bahkan ekspor untuk ke depannya.

Dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI kali ini, Dony juga didampingi oleh Anggota Komisi VII DPR RI lainnya seperti Lamhot Sinaga, Mercy C. Barends, Bambang Patijaya, Bambang Hermanto, Ramson Siagian, Katherine A. oendoen, Abdul Kadir Karding, M. Nasir, Hendrik Sitompul, Tifatul Sembiring, Mulyanto dan Nasril Bahar. **ayu/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi VII: Permintaan Kebutuhan Semen Diharapkan Naik Seiring Bangkitnya Ekonomi Indonesia



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke PT Semen Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Jumat (14/7/2023).

Pembangunan infrastruktur yang cukup masif dilakukan pemerintah menempatkan semen sebagai komoditas unggulan. Karena itu, permintaan semen untuk mendukung kebangkitan pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan IKN pasca pandemi covid-19 dipastikan akan meningkat terus.

Sejalan dengan hal itu, lanjutnya, maka produksi semen akan terus meningkat. Namun demikian, peningkatan produksi semen berpotensi memicu timbulnya polutan akibat peningkatan klinker. Klinker tersebut merupakan padatan yang hadir sebagai produk intermediet dalam produksi semen portland. Dampaknya, semakin banyaknya klinker tersebut akan terjadi peningkatan emisi CO₂ (karbon dioksida).

"Selain meningkatkan emisi karbon dioksida, peningkatan produksi semen juga akan meningkatkan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar yang kurang ramah lingkungan. Untuk mendukung tercapainya program pemerintah *Net Zero Emission 2060*, Komisi VII DPR RI bersama pemerintah bekerja keras untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke PT Semen Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Jumat (14/7).

Ia berharap, berbagai isu sentral transisi energi dan pengembangan energi baru dan energi terbarukan akan mendapatkan solusi yang optimal dengan terbitnya

Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagai payung hukum yang kredibel.

"Dengan bangkitnya ekonomi Indonesia, diharapkan demand akan semen juga akan naik, dan PT Semen Indonesia juga bisa terus *survive*. Kapasitas produksi dan jumlah ketersediaannya juga dapat optimal," tandasnya.

Seperti diketahui, PT Semen Indonesia merupakan produsen semen terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi semen mencapai 56,5 juta ton/tahun. Pangsa pasar domestiknya menduduki posisi terbesar, yakni lebih dari 50 persen. Saat ini Pemerintah RI memegang saham sebanyak yakni 51 persen, dan Publik Indonesia memiliki sejumlah 17 persen. Sedangkan Publik Asing memegang saham sebanyak 32 persen.

Adapun beberapa bentuk dukungan yang dibutuhkan dan diharapkan oleh PT Semen Indonesia saat ini yaitu adanya moratorium, baik untuk investasi pabrik baru maupun penambahan kapasitas pabrik semen di Indonesia, untuk menjaga stabilitas antara *demand* dan *supply*.

Bentuk dukungan lain yang juga dibutuhkan PT Semen Indonesia yakni terkait soal keberlanjutan pasokan bahan bakar, terutama batubara, dengan harga acuan sesuai *Domestic Market Obligation (DMO)*. Serta pemberian insentif keuangan bagi perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan. **dep/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Korban TPKS Tidak Tertanggung BPJS, Nurhayati Soroti Perpres 82 Tahun 2018

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati menyoroti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dan meminta Komisi IX untuk mendalami kembali aturan tersebut terutama terkait dengan penganggarnya. Pasalnya, ketika menerima kunjungan Komisi IX DPR RI, Direktur RSUD Dr. Zainoel Abidin, Isra Firmansyah menyatakan bahwa tidak tertanggungnya pelayanan kesehatan bagi korban tindak pidana penganiayaan dan kekerasan seksual oleh BPJS ini memang telah diatur dalam Perpres tersebut.

"Nah ini menurut Ketua (Tim Kunjungan Kurniasih Mufidayati) tadi akan diundang LPSK beserta BPJS, kita juga ingin mengetahui, karena kita ketahui bahwa dalam

TPSK itu sudah diatur. Nah harusnya penganggarnya sudah jelas," tutur Nurhayati kepada saat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Zainoel Abidin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Minggu (16/7).

Diketahui, berdasarkan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada pasal 52 huruf r memang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dijamin BPJS.

Meski begitu, dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU No 31 Tahun 2014,

disampaikan bahwa korban dapat mengajukan permohonan kepada LPSK untuk mendapatkan layanan pengobatan atau perobatan.

"Tentunya kalau berdasarkan UU (Perlindungan Saksi dan Korban dan) Perpres 82, kita menginginkan anggaran yang dikucurkan kepada LPSK harus serius gitu, harus bisa menutupi jumlah daripada korban-korban kekerasan dan penganiayaan ini. Nah ini yang kami ingin tahu selama ini LPSK bagaimana penganggarnya untuk para korban ini dan bagaimana kita bisa melihat kedepannya bahwa korban-korban ini bisa ada pembiayaannya apakah bisa melalui BPJS kesehatan atau ketenagakerjaan," jelas Legislator Dapil Jawa Barat XI itu.

Ia pun menyatakan bahwa DPR berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana penganiayaan dan kekerasan seksual terutama kaum perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

"Sekarang ini korban kekerasan atau penganiayaan itu terlihatnya sedikit. Hal ini karena banyak rumah sakit akhirnya melaporkan bahwa ini adalah bukan tindak kekerasan atau penganiayaan tetapi adalah mungkin ada kejadian-kejadian yang memang mengharuskan mereka berobat. Sehingga yang kami rasa adalah, kami menginginkan pemerintah serius dalam menangani kekerasan terutama terhadap wanita dan perempuan dan anak-anak," tegasnya



FOTOGAL/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Zainoel Abidin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

gal/rdn



Legislator Perjuangkan Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Papua Barat Daya

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan komitmen dan dukungannya terhadap pembangunan rumah sakit provinsi di Papua Barat Daya, karena provinsi ini merupakan provinsi baru yang belum memiliki rumah sakit provinsi dan saat ini baru ada rumah sakit kabupaten yang akan ditingkatkan kelasnya.

"Kami mendorong agar nanti di Papua Barat Daya ini akan ada rumah sakit provinsi yang bisa menjadi miliknya provinsi. Kalau yang kita kunjungi tadi kan di RSUD Dr. J.P. Wanane punya kabupaten yang akan kita tingkatkan karena belum ada rumah sakit provinsi, sembari ini ditingkatkan kita akan mendorong di Papua Barat Daya ada rumah sakit provinsi yang bisa dihadirkan," ungkap Melkiades, di Sorong Papua Barat Daya, Jumat (14/7).

”

KAMI MENDORONG AGAR NANTI DI PAPUA BARAT DAYA INI AKAN ADA RUMAH SAKIT PROVINSI YANG BISA MENJADI MILIKNYA PROVINSI.



FOTO: SKR/PTD

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena saat mengunjungi salah satu rumah sakit di Papua Barat Daya.

Papua Barat Daya saat ini masih menghadapi kekurangan fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit tingkat provinsi. Namun, berdasarkan paparan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, rencananya pada tahun 2023 akan dilakukan studi kelayakan, pembuatan rancangan teknis detail (DED), dan perencanaan pembangunan rumah sakit rujukan provinsi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya dengan anggaran sebesar Rp2.496.691.000.

Dalam upaya mempercepat pembangunan, Pemerintah

Provinsi Papua Barat Daya meminta dukungan dari Komisi IX DPR RI. Melkiades sendiri sampaikan bahwa akan memberikan dukungan dan mendorong langkah-langkah untuk pendirian rumah sakit tipe B dan/ atau rumah sakit rujukan provinsi di Papua Barat Daya ini.

Dengan adanya dukungan ini, diharapkan masyarakat Papua Barat Daya dapat menikmati fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lebih mudah diakses. Pembangunan rumah sakit provinsi ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. skr/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi X Apresiasi Program Pengembangan Literasi Perpustakaan Banyuwangi

Wakil Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi pengelolaan

Perpustakaan Daerah (Pusda) Kabupaten Banyuwangi yang dinilai memiliki berbagai inovasi dan kreativitas dalam pengembangan program literasi. Menurutnya, berbagai program pengembangan program literasi ini layak didukung oleh pemerintah pusat dan ditiru oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

"Kabupaten Banyuwangi yang memang sangat dikenal dengan berbagai inovasi dan kreativitasnya di dalam pembangunan daerah. Salah satunya terkait dengan literasi, baru saja membuat pekan literasi dan kami lihat sendiri bagaimana perpustakaan daerah dikelola dengan sangat baik. Walaupun (bangunannya) kecil dibandingkan mungkin daerah-daerah lain tetapi sangat luar biasa program-programnya," katanya di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, (18/7).

Komisi X pun, lanjut Hetifah, berharap bisa memberikan dukungan terkait program-program literasi yang sudah dilakukan di Banyuwangi. Salah satunya adalah mengenai penyediaan platform khusus yang menyediakan berbagai buku-buku digital dan itu khusus terkait tentang daerah maupun yang umum yang dinilainya sangat menginspirasi.

"Kolaborasi juga dikembangkan misalnya dengan dinas pendidikan bagaimana ada satu kerjasama. Sehingga kunjungan tetap banyak. Kemudian juga dikembangkan ada



Wakil Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, (18/7/2023).

platform khusus yang menyediakan berbagai buku-buku digital dan itu khusus terkait tentang daerah maupun yang umum. Nah, yang lebih menarik lagi bagi para guru diberi kesempatan untuk menulis dan nanti diterbitkan secara gratis oleh perpustakaan daerah ini," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Hetifah juga mengapresiasi terkait kelengkapan koleksi buku yang dimiliki Pusda Banyuwangi. Hetifah menilai, meski bangunan Pusda Banyuwangi tidak begitu besar namun koleksi buku yang dimiliki cukup lengkap dan baru.

"Jadi betul-betul dipilih dan banyak buku-buku novel terbaru yang menarik dan juga buku-buku kekinian yang terkait dengan kehidupan seperti psikologi ataupun filsafat, semua lengkap. Tetapi memang jumlah 10.000 buku tidak terlalu banyak,

tetapi terpilih. Tentu saja kita sangat bangga dan mengapresiasi adanya perpustakaan yang dikelola dengan penuh perhatian, cermat, dan kreatif," terangnya.

Namun demikian, Hetifah mengkritisi minimnya pustakawan yang ada di Pusda Banyuwangi. Karena itu, ia berharap jumlah pustakawan itu bisa segera ditambah sehingga bisa mengoptimalkan pelayanan dan pembinaan terhadap lebih dari 1.000 perpustakaan yang ada di Banyuwangi.

"Jadi ini juga menjadi perhatian kami di pusat, bagaimana tenaga pustakawan itu juga bisa diperbanyak. Sehingga, daerah-daerah seperti Banyuwangi yang juga akan mengelola atau memberikan pembinaan kepada lebih dari 1.000 perpustakaan di kabupaten ini bisa mendapatkan dukungan," tutupnya. [we/rdn](https://www.we/rdn)



Farhan Ungkap Masalah Penurunan Industri TPT di Bandung Raya

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Farhan mengungkapkan masalah yang menyebabkan penurunan pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di wilayah Bandung Raya. Diketahui, TPT di wilayah Bandung Raya merupakan salah satu daerah sentra industri terbesar di Indonesia dan sebelumnya mampu menyerap tenaga kerja yang besar di Jawa Barat.

"Dari berbagai macam pihak pelaku, termasuk pelaku industri dari

level pabrik kelas dunia sampai ke industri kecil menengah, ternyata terungkap salah satu yang sangat mengkhawatirkan dan memukul industri TPT adalah impor ilegal tekstil dan pakaian bekas yang masuk secara masif melalui orang-orang yang tidak memiliki atau mematuhi ketentuan importasi Indonesia," ujar Farhan di sela-sela kunjungan kerja Baleg DPR ke PT. KEWALRAM Indonesia di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (10/7).

Farhan sendiri menilai isu terkait impor ilegal tekstil dan peredaran pakaian bekas di Indonesia tidak dapat disepelekan, mengingat dampaknya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi sektor sandang. "Harus menjadi perhatian semuanya. Jangan dianggap kacang-kacangan. Ini serius. Karena kalau dibiarkan maka industri tekstil yang merupakan salah satu

pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa hancur," ujarnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini pun mengungkapkan aspek utama yang menyebabkan maraknya impor ilegal tekstil dan barang bekas di Indonesia. "Kita perlu memperhatikan berbagai macam aspek, salah satu yang utama adalah jalur distribusi barang-barang impor tersebut," ungkapnya.

Menurutnya pengetatan terhadap jalur distribusi impor tekstil tersebut penting dilakukan, guna mencegah masyarakat atau Konsumen memiliki akses terhadap barang tersebut. "Apakah melalui aplikasi *e-commerce*, atau pelabuhan-pelabuhan besar yang di dalamnya terdapat oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan impor masuk Indonesia," jelasnya.

Oleh karena itu Legislator dari Dapil Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi itu berharap pihaknya dapat terus mendapatkan masukan terkait berbagai permasalahan yang terjadi, untuk nantinya diselesaikan melalui produk legislasi yang dihasilkan.

"Kami berharap bahwa Panja Sandang Baleg DPR RI ini bisa terus mendapatkan berbagai masukan terkait masalah sandang untuk kita buat menjadi sebuah produk legislasi yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada," tutup Farhan.

rr/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Farhan saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Baleg DPR RI ke PT. KEWALRAM Indonesia di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (10/07/2023).

FOTO: RR/PDT

Wakili Parlemen ASEAN, Fadli Zon Puji Pemilu Kamboja Berlangsung Lancar

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyampaikan apresiasi terhadap seluruh proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung di Kamboja. Fadli memuji proses Pemilu di negara tersebut yang berjalan dengan lancar, tertib dan damai dimana tidak ada insiden, pemaksaan atau hal-hal yang menonjol.

"Kami menyaksikan rakyat Kamboja menggunakan hak politik mereka secara antusias, lebih dari 84% datang ke TPS," ujar Fadli dalam keterangan resmi yang diterima **Parlementaria**. Senin (24/7) usai diundang Pemerintah Kamboja menjadi observer internasional Pemilihan Umum Kamboja ke-7 pada tanggal 23 Juli 2023 di Phnom Penh.

Melalui konferensi pers dan mewakili delegasi ASEAN *Inter-Parliamentary Union* (AIPA), Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menekankan bahwa kehadiran para observer, termasuk dari delegasi Parlemen anggota AIPA turut membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas selama proses pemungutan dan penghitungan suara.

Selain itu, Fadli juga menggarisbawahi kerja sama dan hubungan Indonesia dan Kamboja harus tetap berjalan baik dan ditingkatkan melalui kerja sama antar Parlemen. "DPR RI melalui BKSAP siap bekerja sama dengan siapapun yang akan menduduki



FOTO: IST/PDT

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat menyaksikan secara langsung proses Pemilu di Kamboja.

kursi Parlemen Kamboja untuk meningkatkan kerja sama Parlemen dan hubungan Indonesia-Kamboja," tandas Fadli.

Kedepannya, Fadli mengharapkan bahwa tradisi pemantauan untuk terus diadakan di negara-negara lainnya, termasuk di kawasan ASEAN dengan mengundang perwakilan dari Parlemen anggota AIPA. Sebagaimana diketahui, Fadli juga mewakili Parlemen ASEAN (AIPA) menyampaikan pernyataan dan tanggapan terkait observasi hasil Pemilu Kamboja. Fadli mengikuti proses pemantauan pembukaan

di sejumlah TPS hingga proses perhitungan surat suara.

Parlemen Kamboja mengundang delegasi Parlemen negara-negara ASEAN menjadi observer sesuai kesepakatan saat *'Parliamentary Preparatory Meeting pada ASEAN-AIPA Leaders Interface Meeting'*, di Labuan Bajo pada Mei lalu. Sejauh yang diinformasikan, lebih dari 8 juta 200 ribu orang telah memilih di pemilihan umum ke-7 kali ini. Hasil awal juga menunjukkan Partai CPP memenangkan 120 kursi, sedangkan Partai Funcinpec memperoleh lima kursi.

pun/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sidang Umum ke-44 AIPA Momen Tagih Komitmen Pendanaan Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Sidang Umum ke-44 'ASEAN Inter-Parliamentary Union' (AIPA) yang akan digelar di Jakarta, pada tanggal 5-11 Agustus 2023 mendatang menjadi momentum bagi Indonesia, secara khusus, sebagai paru-paru dunia dan juga ASEAN, secara umum, untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan aksi iklim.

Diketahui, pada *15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC* di Kopenhagen, Denmark, pada 2009 lalu, disebutkan bahwa negara-negara maju berkomitmen terhadap tujuan kolektif untuk memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim terhadap negara berkembang. Yaitu, untuk aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi terhadap pelaksanaan.

Demikian dipaparkan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana saat diwawancarai **Parlementaria** usai hadir sebagai Narasumber dalam diskusi Koordinatariat Wartawan Parlemen-Biro Pemberitaan Parlemen-BKSAP DPR RI dengan tema 'Parlemen yang Responsif untuk Stabilitas dan Kesejahteraan ASEAN' di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7).

"Bahwa Indonesia dalam ASEAN kita menjadi (seperti) negara 'kakak' daripada kawasan kita, yang menunjukkan bahwa Indonesia sudah menjadi paru-paru dunia Indonesia.

(Karena itu) harus mendapat dukungan dari negara ASEAN (atas) komitmennya untuk mendorong negara maju berkomitmen terhadap dana yang dijanjikan sebesar 100 miliar dolar untuk diberikan kepada negara-negara berkembang dan negara-negara yang 'miskin'," ujar Putu.

"Sehingga ini memang belum kita mampu mewujudkan. Dan harapannya jika ini tuntutan Indonesia harapannya juga menjadi tuntutan kawasan ASEAN kepada negara-negara yang maju," sambung Ketua Desk Kerja Sama Regional BKSAP DPR RI ini menegaskan. Di sisi lain, ia juga ingin menyampaikan bahwa Indonesia dalam implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* termasuk terdepan dibandingkan negara-negara lainnya.

"Negara lainnya karena tantangan tadi saya sampaikan (adanya) perang itu (membuat) ketahanan pangannya juga terganggu, ketahanan energinya terganggu. Indonesia secara geografis sangat diuntungkan karena tidak memiliki musim yang ekstrem (tapi) justru kita bisa mempertahankan pencapaian SDGs itu jauh di atas negara-negara lainnya bahkan di atas 70 persen pencapaian SDGs," ungkap Putu.

Namun demikian, tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, yang terpenting adalah bagaimana komunikasi pencapaian dan SDGs tersebut juga disampaikan kepada daerah-daerah, tidak hanya di tingkat pusat. "Tapi masyarakat dari *bottom up* itu juga bisa bagaimana mereka memahami mengerti untuk mengawal terjadinya tujuan pembangunan berkelanjutan," pungkas Putu.

— pun,del/rdn



FOTO: RSB/PDT

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana saat menjadi Narasumber dalam diskusi Koordinatariat Wartawan Parlemen-Biro Pemberitaan Parlemen-BKSAP DPR RI di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Banyak Usia Muda, KORPRI Setjen DPR Dukung Pembinaan Atlet Muda di Lingkungan DPR



Ketua KORPRI Setjen DPR RI, Djaka Dwi Winarko saat foto bersama dengan atlet olahraga di Lingkungan DPR dalam rangkaian acara PORNAS XVI KORPRI di Semarang.

FOTO: JKA/PDT

Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Djaka Dwi Winarko akan selalu mendukung pembinaan para pegawai Setjen DPR yang ingin menjadi atlet olahraga di Lingkungan DPR. Pasalnya, Setjen DPR telah mendapatkan tambahan CPNS yang jumlahnya cukup banyak dan usianya masih muda-muda dan memiliki potensi yang bagus untuk dibina. Sehingga, menurutnya, hal itu juga menjadi salah satu fokus dari para pengurus KORPRI Setjen DPR.

"Jadi ketika para CPNS ini baru masuk, ketika masa diklat mereka sudah kita perkenalkan KORPRI dan cabang olahraga yang ada di Setjen DPR. Dengan demikian, kita harapkan teman-teman CPNS ini

”

JADI KETIKA PARA CPNS INI BARU MASUK, KETIKA MASA DIKLAT MEREKA SUDAH KITA PERKENALKAN KORPRI DAN CABANG OLAHRAGA YANG ADA DI SETJEN DPR.

dari awal sudah mengenal dan nanti akan rajin berolahraga, berkesenian, atau kegiatan keagamaan. Apapun yang dia pilih kita pasti akan fasilitasi dan kita kembangkan," ujar Djaka saat diwawancarai **Parlementaria** di Jakarta, Selasa (18/7).

Kalau perlu, kata Djaka, KORPRI Setjen DPR akan mencari pelatih

yang memang mempunyai kualitas sebagai pelatih. Sehingga nanti ada peningkatan kapasitas dari para atlet.

"Selalu dikatakan oleh Pak Sekjen, kita-kita ini terutama yang generasi-generasi yang sudah tua ini atau 'generasi kolonial', lima tahun ke depan semuanya sudah berganti. Dan ini semuanya akan ada estafet kepemimpinan organisasi kepada yang muda-muda. Makanya yang muda-muda ini harus siap *soft skill* maupun *hard skill*-nya. Baik itu keterampilan kerja, sikap dan olahraga ini. Nanti soliditas antara rekan kerja, Biro dan Deputi bisa berjalan kekompakannya. Itu yang kita harap dari awal untuk dimiliki oleh teman-teman yang kelompok muda ini, supaya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi," imbuh Djaka.

jk/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



BURT Apresiasi Rakor Pembinaan Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli oleh BK DPR

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Achmad Dimiyati Natakusumah, mengapresiasi kegiatan rapat koordinasi (rakor) Pembinaan Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (TA AKD) DPR RI, yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian (BK) DPR RI. Ia menilai rakor ini sangat baik, dimana seharusnya diikuti oleh seluruh TA AKD.

Adapun TA AKD kurang lebih mencapai 170 orang, sementara TA Anggota Dewan sekitar 2000. "TA

Fraksi ini bisa mencapai 200-300 orang. Kalau dilakukan kolaborasi antar TA, maka kita tidak kekurangan kemampuan keahlian untuk melawan kelebihan pemerintah. Kita kan tugasnya mengawasi pemerintah, supaya roda eksekutif berjalan bagus, sehingga kita bisa equal, sebanding dengan eksekutif dan juga yudikatif," ujar Dimiyati usai membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli AKD di Ruang Pustakaloka, Senayan Jakarta, Rabu (12/7).

Dalam kesempatan yang juga dihadiri oleh anggota Baleg DPR RI, Ferdiansyah, Sekjen DPR dan Kepala BKD, itu, Dimiyati berharap TA AKD harus pro aktif dan jangan diam. Jangan hanya mencatat dan mendengarkan saja, namun lebih dari itu juga bisa memberikan input atau masukan.

Sehingga bisa mendukung atau membantu penuh DPR dalam

menjalankan tugas kedewanan seperti legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam bidang legislasi misalnya, mana RUU (Rancangan Undang-Undang) yang sudah bisa diharmonisasi, tidak beririsan, tidak bertabrakan dengan undang-undang lainnya, atau bertentangan dengan konstitusi.

"Di bidang anggaran juga, harus betul-betul dikaji semua *budget impact*-nya. Misalnya terkait dengan aturan-aturan. Itu kan ada dampak keuangan sehingga tingkat efisiensi, efektivitas, juga tingkat ekonomisnya bisa berjalan dengan baik. Nah itu juga TA harus memberikan respon, itu di bidang anggaran," tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Begitu juga di bidang pengawasan, TA AKD harus memberikan masukan, kajian dan kritikan yang harus di informasikan kepada pimpinan AKD. Misalnya apa yang sebaiknya dilakukan eksekutif terkait sebuah kebijakan yang dibuatnya dalam kerangka legislatif, dan mana kebijakan yang harus didukung penuh oleh legislatif.

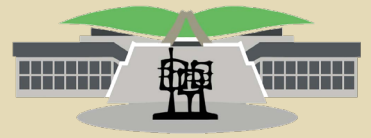
"Jadi, jangan malah saya dapat laporan, ada TA/AKD yang enggak pernah datang sama sekali ke DPR, itu kayak abal-abal. Dan menurut saya, idealnya selalu dilakukan evaluasi terhadap TA AKD ini. Saya minta triwulan sekali, kalau 3 bulan tidak hadir, maka ini bisa ditanyakan lagi ke pimpinan untuk dilakukan evaluasi terhadap TA tersebut. Bahkan kalau ada apa-apa, bisa lapor saya selaku pimpinan BURT DPR RI, saya akan tegas terhadap hal itu," pungkasnya. [ayu,irlu/aha](https://www.ayu.irlu/aha)



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Achmad Dimiyati Natakusumah saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli AKD di Ruang Pustakaloka, Senayan Jakarta, Rabu (12/7/2023).



KEPALA BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETJEN DPR RI, SURATNA FOTO BERSAMA USAI MEMBUKA KEGIATAN SEMINAR DENGAN TEMA "ETIKA DAN BATASAN PENGGUNAAN CHAT- GPT DALAM PENULISAN ILMIAH", RABU (26/7/2023). FOTO: OJI/PDT



KETUA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DPR RI ADANG DARADJATUN DALAM KONFERENSI PERS YANG DILAKUKAN PIHAK MKD DPR DI GEDUNG PARLEMEN, JAKARTA, RABU (12/7/2023). FOTO: JKA/PDT



ANGGOTA KOMISI V DPR RI FADHOLI SAAT BERBINCANG USAI RAPAT BERSAMA WALIKOTA SALATIGA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN KEMENTERIAN PUPR, KAMIS (6/7/2023). FOTO: AFR/PDT

